



tribunjogja.com

HARIAN PAGI

tribunnews.com

JUMAT PON

22 NOVEMBER 2024
20 JUMADILAWAL 1446
NO 4835/TAHUN 14
HALAMAN

KOTA YOGYA

Sampah Liar Tertumpah Lagi di Gunungkidul

ALAS MULUHAN
Dondong, Jatis, Saptosari,
Gunungkidul Di Yogyakarta

LOKASI TUJUAN

- Lima truk diamankan polisi setelah kedatangan membawa sampah untuk dibuang secara liar dan ilegal di Padukuhan Dondong, Jatis, Saptosari, Gunungkidul, Rabu (20/11).
- Tiga truk di antaranya kedatangan sudah menumpahkan sampah di lahan warga setempat di kawasan hutan jati tersebut.
- Sampah-sampah itu diduga berasal dari Kota Yogyakarta dan sudah ada perjanjian dengan pemilik lahan untuk membuang limbah di lokasi itu.
- Kasus ini mengulang lagi kejadian pada Mei 2024, di mana DLH Gunungkidul menemukan lima titik pembuangan sampah ilegal dari daerah lain ke wilayahnya.
- Pembuangan sampah secara ilegal dari Kota Jogja ke Saptosari ini terjadi selang beberapa hari setelah Menteri LHK menyorel tumpukan sampah di Depo Mandala Krida, Senin (18/11) lalu.

■ **Limbah dari Yogya Dibuang di Saptosari**

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Sebanyak lima truk diamankan polisi setelah kedatangan membawa sampah untuk dibuang secara liar dan ilegal di Padukuhan Dondong, Kalurahan Jatis, Kaparewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Rabu (20/11). Sampah-sampah itu diduga berasal dari Kota Yogyakarta.

Saat dikonfirmasi Kapolsek Saptosari, AKP Suyanto, mengatakan lima *dump truck* itu diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat.

● ke halaman 11

...Sampah dibawa dari depo di Mandala Krida Kota Yogyakarta. Itu jenis sampah rumah tangga...

FOTO: ISTIMEWA/GRAPIS: FAUZIARAKHMAN

Sampah Liar

• Sambungan Hal 1

syarakat. "Dari laporan itu, ada lima *dump truck* melintas menuju ke Alas Muluh-an di Padukuhan Dondong, tepatnya di kawasan hutan jati. Kemudian, personel kami langsung mendatangi tempat kejadian bersama pamong Kalurahan Jetis dan didapatkan benar ada kejadian tersebut," ujarnya. Kamis (21/11).

Ia melanjutkan, pihaknya langsung melakukan pengecekan di lokasi, ternyata tiga truk sudah menumpahkan sampah di lokasi tersebut. Pihaknya kemudian langsung membawa lima sopir truk untuk diminta keterangan terkait hal tersebut. Dari keterangan para sopir, lanjut dia, sampah tersebut dibawa dari Kota Yogyakarta untuk dibuang di lahan milik warga setempat. Di mana, awalnya sudah ada perjanjian dengan pemilik lahan untuk membuang sampah ke lokasi tersebut.

"Jadi, lahan tempat sampah itu dibuang merupakan milik warga di sana. Dari keterangan sopir, belum ada transaksi pembayaran karena sudah keduluan diamankan. Setelah dimin-tai keterangan, sopir kami pulangkan, rencana akan kami panggil kembali Jumat (22/11)," tuturnya.

Kepala Dinas Lingkungan (DLH) Kabupaten Gunungkidul, Harry Sukmono, mengatakan, sampah yang dibawa lima truk itu berasal dari depo penampungan sampah Mandala Krida, Kota Yogyakarta. "Iya, kami sudah menerima laporan itu. Sampah dibawa dari depo di Mandala Krida Kota Yogyakarta. Itu jenis sampah rumah tangga. Untuk berapa banyak, kami tidak mengetahui pasti," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya pun sudah memintai keterangan dari pemilik lahan soal lokasi pembuangan tersebut. "Dari keterangannya, si pemilik berniat menutup tegalan di lahannya menggunakan sampah tadi. Pemilik bilang tidak tahu kalau yang dilakukannya memba-

wa sampah dari luar daerah merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum," ucapnya.

Atas kejadian ini, pihaknya pun memberikan tegur-an kepada pemilik lahan dan pihak kalurahan setempat. "Kami sudah ingatkan bahwa membawa sampah dari luar daerah itu adalah tindakan ilegal dan melanggar perda. Bahkan, kami sudah berikan surat edaran ke setiap panewu agar disampaikan ke masyarakat untuk tidak membawa sampah dari luar daerah kemudian dibu-ang di sini. Kami harap aturan tadi dipatuhi," ucapnya.

Diwawancarai secara terpisah, Lurah Jetis, Agus Susanto, menuturkan bahwa aktivitas pembuangan sampah tersebut belum mengan-tongi bertzini. "Itu tidak ada izinya, dari pemilik katanya ini baru pertama kali. Kata-nya sampah itu untuk diu-ruk," ucapnya.

Dia mengaku sudah me-nyosialisasikan kepada ma-syarakat bahwa tidak boleh membawa sampah dari luar daerah. Jika ingin mengelola sampah dalam skala besar, harus memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkung-an Hidup, sehingga tidak bo-leh dilakukan sembarangan.

"Padahal, di lokasi pembuangan sampah itu sudah dipasang tulisan larangan membuang sampah, masih saja dilanggar. Tadi, kami minta kepada pemiliknya agar sampah-sampah yang sudah telanjur dibuang un-tuk dibersihkan kembali," tandasnya.

Kejadian berulang

Pembuangan sampah se-cara ilegal dari daerah lain ini bukan pertama kalinya terjadi di Gunungkidul. Ca-tatan *Tribun Jogja*, kasus serupa juga pernah terjadi pada Mei 2024 silam. DLH Gunungkidul menemukan setidaknya lima titik pembu-angan sampah ilegal di wi-layahnya. Kelima lokasi itu yakni di Kalurahan Giring dan Mulusan (Kapanewon Paliyan), Giripurwo (Purwo-sari), Girimulyo (Panggang), dan Kapanewon Karangmo-jo. Sampahnya diduga bera-sal dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, hingga Kota

Yogyakarta. Pemerintah da-erah setempat kini berupaya keras untuk mencegah keja-dian serupa terulang lagi.

Di sisi lain, pembuangan sampah secara ilegal dari Kota Yogya ke Saptosari ini terjadi selang beberapa hari setelah Menteri Lingkung-an Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi men-dadak ke Depo Mandala Krida. Senin (18/11) lalu. Dalam kunjungannya itu, Hanif menyampaikan keke-cewaannya terhadap kondisi tumpukan sampah di depo itu. Ia menilai pengelolaan sampah di Kota Yogya tidak mencerminkan keseriusan pemerintah daerah.

Hal itu kemudian juga mendapat respons dari Gu-bernur DIY, Sri Sultan Ha-mengku Buwono X, dengan menanggul Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto dan Sekda Kota Yogya Aman Yurjadijaya pada Selasa (19/11).

Sultan meminta PJ Wali Kota untuk memberikan su-rat klarifikasi resmi kepada Menteri LHK terkait kondisi pengelolaan sampah yang ada. Bahkan, jika memung-kinkan, ia meminta Sugeng untuk menemui Menteri Ha-nif secara langsung. Menu-rut Sultan, permasalahan di Depo Mandala Krida terjadi karena adanya sampah yang belum diangkut.

"Mungkin beliau (Menteri LHK) kan *enggak* paham, ta-hunya cuma ada tumpukan saja," kata Sultan.

Sri Sultan mengingatkan bahwa tanggung jawab uta-ma pengelolaan sampah ber-ada pada pemerintah kota, sehingga perlu ada langkah konkret untuk menyelesaik-an masalah tersebut.

Sementara itu, Sugeng mengatakan bahwa sidak menteri tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan, se-hingga pihaknya tidak me-miliki kesempatan untuk menjelaskan langkah-lang-kah yang telah diambil. Su-geng memastikan Pemkot Yogyakarta akan segera ber-surat kepada Menteri LHK untuk menyampaikan kla-rifikasi secara resmi.

Menurut Sugeng, Pemkot Yogyakarta telah melakukan

berbagai upaya untuk me-nangani masalah sampah. Saat ini, sekitar 170-180 ton sampah dari total 200 ton yang dihasilkan setiap hari sudah berhasil dikelola. Namun, keterbatasan fas-ilitas pengolahan dan lahan menjadi kendala utama.

Anggaran

Kalangan legislatif menyopo-roti anggaran pengelolaan dan pengentasan masalah sampah di Kota Yogya yang dinilai terlalu kecil. Kritikan serupa juga dilontarkan oleh Menteri LHK saat sidak.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nu-janat, mengungkapkan, ke-bijakan itu menunjukkan kurangnya keseriusan Pem-kot Yogya dalam mengatasi problem berkepanjangan ini. Ia menyebut, pengada-an sarana prasarana un-tuk menyelesaikan masalah sampah masih mengandalk-an dana dari pusat dan provinsi.

Dari aspek kerangka ang-garan, angka-angka yang tersaji menunjukkan Pem-kot Yogya cenderung pelit untuk menyelesaikan masalah sampah. Namun, ironis-nya, berdasarkan pengamat-annya, terdapat salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang rutin menyum-bangkan sisa anggaran (sil-pa) dalam jumlah besar.

"Angkanya sampai pu-luhan miliar. Tapi, kenapa kemudian polanya masih di-ulang lagi. Saya melihat di Rancangan APBD 2025, itu masih diulang lagi. Mustinya ada alokasi yang bisa dialih-kan untuk pengelolaan sam-pah. Jangan pelit, kalau saya cermati masih bisa. Nanti di badan anggaran terus terang akan saya kritisi," cetusnya.

Ia mendesak efektivitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam me-lakukan monitoring dan evaluasi Politikus Partai Ge-rindra tersebut berharap, alokasi untuk menyelesaikan masalah sampah bisa ditambah, tidak berhenti di kisaran Rp90 miliar.

"Mustinya penyumbang sil-pa porsinya bisa dialihkan, untuk difokuskan menyele-saikan masalah sampah. Se-harusnya, di 2024 ini bisa se-lesai," urainya. (ndg/ha/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005